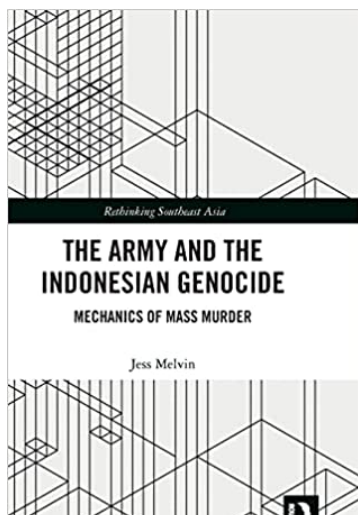


Komando Militer Sistematis dan Terpusat dalam Pembunuhan Massal 1965–1966

WILLY ALFARIUS

Mahasiswa Magister Sejarah UGM

Email: willy.alfarius@gmail.com



Title:

The Army and The Indonesian Genocide:
Mechanics of Mass Murder

Author:

Jess Melvin

Publisher:

Routledge, New York (2018)

Pages:

xxviii+321

ISBN:

978-113-857-469-4

Meski sudah berlalu selama lebih dari setengah abad serta diwarnai berbagai pergantian rezim pemerintahan di Indonesia, penelitian dan pembahasan mengenai Peristiwa 1965 beserta kejadian-kejadian turunannya, terutama peristiwa pembunuhan massal sepanjang 1965-1966, belum surut ataupun berhenti. Walaupun penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM pada masa lalu ini menemui jalan buntu, bukan berarti upaya menuju ke arah sana ikut mandek. Upaya-upaya tersebut terus diusahakan, baik melalui advokasi hukum, kultural, maupun kajian akademis yang berusaha mencari titik terang dari peristiwa yang mengubah nyaris seluruh wajah Indonesia sebelum dan sesudah 1965 tersebut. Saya kira, hasil penelitian di tingkat doktoral yang dilakukan oleh Jess Melvin, sejarawan asal Australia, pada satu dekade lalu adalah salah satunya. Dalam banyak hal, hasil penelitian yang ia lakukan membawa angin segar dan kebaruan bagi penyelidikan peristiwa tersebut.

Hasil penelitian disertasi di Universitas Melbourne, Australia pada 2015 yang cukup menghentak tersebut kemudian terbit menjadi sebuah buku yang dapat dibaca lebih luas oleh khalayak. Setelah melalui penyesuaian dan perbaikan, disertasi tersebut kemudian

terbit menjadi buku pada 2018 dengan judul *The Army and The Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder* yang diterbitkan oleh Routledge, New York. Lalu, apa yang menjadi kebaruan dari buku yang ditulis oleh Melvin tersebut, sekaligus yang membedakannya dengan beberapa penelitian serupa sebelumnya? Sejauh mana hasil penelitian ini dapat berkontribusi bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1965 di masa lalu? Dari pembacaan terhadap buku tersebut, setidaknya ada tiga hal pokok dan penting yang akan diuraikan dengan rinci berikut ini untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut.

Pusaran Politik Aceh dan Latar Belakang Kekerasan

Meski bukan daerah dengan basis massa PKI yang militan dan kuat seperti halnya di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun Bali, skala kekerasan yang terjadi di Provinsi Aceh pada hari-hari setelah meletusnya Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 tidak dapat dikatakan kecil. Melvin dalam buku ini memberikan gambaran kekuatan PKI beserta kelompok-kelompok yang dianggap berafiliasi dengannya seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Concentration Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Himpunan Sarjana Indonesia (HSI), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Pemuda Rakyat, Sarbupri, dan SOBSI, yang jumlahnya relatif kecil tetapi tersebar nyaris merata di seluruh wilayah kabupaten dan kota yang ada di Aceh ketika itu. Kekuatan kelompok kiri ini dalam beberapa hal bersaing cukup sengit dengan kelompok politik Islam, yang dalam hal ini mewarisi semangat para kombatan DI/TII dari masa sebelumnya.

Oleh karena itu, ketika PKI berada dalam posisi yang tidak menguntungkan selepas terjadinya G30S pada 1 Oktober 1965 dini hari di Jakarta, persekusi berupa penangkapan, penculikan, penahanan, hingga pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh komunis menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Ratusan hingga ribuan orang diburu dan ditangkap karena dituduh menjadi bagian dari peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat yang terjadi di Jakarta. Melvin menuliskan bahwa rakyat sipil, dengan dibentuk menjadi grup laskar dan algojo, dikerahkan dalam upaya perburuan dan penangkapan ini. Mereka yang dikerahkan ini selain kelompok yang dianggap sebagai lawan politik orang-orang komunis, juga para preman dan milisi yang sebelumnya dilatih untuk persiapan operasi Ganyang Malaysia. Tentu yang mengerahkan dan kemudian menjadi sponsor dari operasi ini adalah militer, yang dalam hal ini adalah Angkatan Darat melalui komando Ishak Djuarsa, Komandan Komando Daerah Militer (Kodam) Aceh.

Hanya saja, kekerasan fisik ini adalah sesuatu yang bisa disebut baru dan bukan sesuatu yang organik muncul dan tumbuh dari dalam massa rakyat

sendiri. Dalam penelusuran Melvin, terutama didasarkan atas kesaksian para penyintas dan saksi sejarah, sebelum G30S terjadi pada awal Oktober 1965 tersebut, nyaris tidak ada pertentangan dan kekerasan fisik yang terjadi antara PKI dengan kelompok-kelompok lawan politiknya, terutama Islam yang menjadi seteru paling sengit mereka bertahun-tahun sebelumnya. Kompetisi, intrik, serta persaingan sudah pasti terjadi terutama pada paruh pertama dekade 1960-an yang memang memiliki tensi dan tegangan politik yang amat tinggi, yang bahkan sudah mulai muncul sejak Pemilihan Umum 1955 berlangsung. Meski demikian, tidak ditemukan adanya konfrontasi yang terbuka yang kemudian sampai melibatkan kekerasan fisik, bahkan hingga terjadi pembunuhan. Menjadi menarik, ketika situasi pada masa sebelumnya cenderung aman, mengapa kemudian peristiwa pembunuhan-pembunuhan terhadap kelompok komunis menjadi sesuatu yang nampak tidak terhindarkan. Melvin kemudian menguraikan dengan detail latar belakang serta musabab yang dapat menjelaskan jalannya peristiwa kekerasan tersebut.

Temuan Sumber Primer Rahasia

Lantas, apa yang menjadi pembeda utama buku Melvin ini, sekaligus bagaimana ia memberikan jawaban atas pertanyaan di bagian pengantar? Kekuatan utama, pembeda, sekaligus tulang punggung dari buku ini adalah arsip yang digunakan oleh Melvin untuk merekonstruksi kembali jalannya kekerasan yang terjadi di Aceh sepanjang 1965-1966. Secara tidak terduga, seperti yang ia sebutkan dalam bagian pengantar bukunya tersebut, Melvin memperoleh setidaknya 3.000-an lembar halaman arsip di bekas kantor Badan Intelijen Negara di Banda Aceh. Selain itu, ia juga mendapatkan salinan Laporan Tahunan Kodam Aceh yang diperoleh dari Douglas Kammen, salah satu peneliti Australia yang juga berkonsentrasi pada persoalan genosida dan pelanggaran HAM di Indonesia. Dua jenis arsip yang dimiliki Melvin ini yang kemudian menjadi tumpuan utama bagi proses rekonstruksi yang ia lakukan, serta menjadi dasar argumen untuk menyebut kekerasan ini sebagai sebuah genosida.

Poin penting dari temuan sumber tersebut adalah catatan-catatan laporan dan perintah itu berasal dari internal tubuh militer sendiri. Perlu digarisbawahi bahwa hingga kini, penelitian tentang jalannya Peristiwa G30S 1965 beserta rangkaian aksi kekerasan yang menyertainya kemudian tidak satu pun yang dapat menggunakan catatan dari internal militer, bahkan menemukan pun rasanya mustahil mengingat dokumen seperti itu tentu saja sifatnya amat rahasia. Di sisi lain, militer sebagai pihak pelaku tentu saja tidak mungkin membuka, menunjukkan, atau membeberkan dokumen-dokumen internal mereka tentang jalannya operasi penumpasan terhadap kelompok komunis. Oleh karena itu, temuan Melvin atas ribuan lembar dokumen

tersebut amat penting untuk mengetahui apa yang sebetulnya diinterpretasi, dipahami, serta kemudian direncanakan oleh militer merespon situasi dan angin politik yang cenderung berpihak pada mereka di awal Oktober 1965 itu.

Temuan atas tumpukan dokumen tersebut kemudian ia imbangi dengan wawancara dengan 70-an orang yang menjadi penyintas, saksi sejarah, serta para pelaku kekerasan yang tersebar di seluruh kabupaten di Aceh. Kesaksian ini datang terutama dari keluarga para petinggi PKI Aceh semisal Muhammad Samikidin dan Thaib Adamy yang tentu saja menjadi sasaran utama dalam proses perburuan orang-orang komunis. Tidak hanya itu, Melvin mewawancarai para penyintas dari kalangan Tionghoa yang berhasil menyelamatkan diri dengan mengungsi ke Medan sebelum akhirnya menetap di Hongkong hingga sekarang. Para pelaku kekerasan, terutama mereka yang menangkap dan melakukan pembunuhan terhadap orang-orang komunis juga diwawancarai oleh Melvin untuk menggali cerita mereka, terutama dalam hal jalannya operasi serta para pendukung di belakang mereka.

Kesaksian dan ingatan dari para narasumber lisan ini menjadi penting untuk memberikan sudut pandang lain dalam proses rekonstruksi jalannya kekerasan fisik sepanjang lebih dari satu tahun tersebut. Tuturan lisan kesaksian dari para narasumber tersebut kemudian ia padukan dengan berbagai macam instruksi-instruksi militer dalam arsip temuannya. Hasilnya, nyaris seluruhnya presisi dan valid, bahwa segala macam operasi dan tindakan yang dilakukan terhadap orang-orang komunis selalu diawali dengan instruksi secara tertulis ataupun propaganda yang dilakukan melalui rapat-rapat umum dari pihak militer terlebih dahulu, termasuk di dalamnya proses persiapan yang dilakukan oleh kelompok paramiliter, preman, dan algojo sebagai pelaku di lapangan.

Menguliti Anatomi Jalannya Kekerasan

Seperti disebutkan di atas, temuan atas berkas-berkas internal militer yang diproduksi sejak hari-hari pertama Oktober 1965 membuat Melvin mampu menguliti anatomi jalannya kekerasan yang terjadi di Aceh. Ia mencoba menyusun secara kronologis situasi yang terjadi di tiap kabupaten di Aceh serta bagaimana militer bergerak bersama-sama regu sipil bentukan mereka untuk menyiapkan aksi dalam operasi penghancuran terhadap PKI. Dalam hal jumlah pembunuhan, berkas temuan Melvin mencatat terdapat setidaknya 1.941 orang yang dibunuh di seluruh Aceh. Sebuah angka yang kemungkinan jumlahnya lebih besar jika mengingat banyaknya pembunuhan yang tidak tercatat atau berada di luar kendali militer itu sendiri.

Apa yang dilakukan oleh Melvin dapat disebut sebagai sebuah pendekatan baru mengingat pasca Orde Baru, penelitian mengenai 1965 kebanyakan berfokus pada mencatat, merekam, dan mendokumentasikan kesaksian dari para penyintas, baik mereka yang ditahan di penjara-penjara

di berbagai kota di Indonesia maupun secara khusus yang ditempatkan dalam kamp konsentrasi Pulau Buru. Hal tersebut lumrah mengingat sepanjang Orde Baru berkuasa, amat kecil kemungkinan serta begitu berbahaya bagi seorang bekas tahanan politik untuk memberikan kesaksian atas pemenjaraan sewenang-wenang dan tanpa pengadilan yang mereka terima dan rasakan pada sekitar satu dekade awal Suharto berkuasa. Berbagai macam kesaksian yang lantas dibukukan dan juga difilmkan tersebut kemudian menguak secara gamblang bagaimana Orde Baru melalui aparatus militernya melakukan kekerasan yang luar biasa, dalam hal ini terutama pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh komunis dan memberontak terhadap negara.

Pemahaman terhadap seluruh rangkaian peristiwa tersebut dimonopoli oleh narasi tunggal susunan pemerintah Orde Baru sendiri sejak peristiwa tersebut masih belum genap dua bulan berlalu. Bahkan setelah peristiwa tersebut berlalu 30 tahun lamanya, pemerintah Orde Baru di bawah kekuasaan Suharto menerbitkan buku putih pada 1995 sebagai “narasi baku dan resmi” terhadap peristiwa tersebut. Juga biasanya, validasi maupun legitimasi atas kekerasan tersebut berulang kali didaur-ulang dalam berbagai biografi para elite militer, politik, atau gerakan yang menjadi pelaku kekerasan. Tidak hanya narasi dalam bentuk teks, berbagai macam produk budaya lain seperti film, museum, diorama, hingga monumen juga terus mengulang hal yang sama.

Karya pertama yang mencoba melihat secara utuh peristiwa tersebut, sekaligus menjadi penantang utama atas narasi resmi pemerintah Indonesia, tentu saja dokumen yang kemudian dikenal sebagai *Cornell Paper* yang disusun dua Indonesianis ternama, Benedict Anderson dan Ruth T. McVey. Ringkasnya, Anderson dan McVey menyebutkan bahwa G30S adalah sebuah friksi internal dalam tubuh Angkatan Darat yang berujung pada pembunuhan para jenderal dan perwira tinggi AD. Setelahnya, kajian yang mencoba meneliti dan menguliti jalannya peristiwa tersebut baru muncul jauh beberapa dekade kemudian ketika John Roosa melalui *Pretext for Mass Murder* pada 2006 menyisir kembali bagaimana peristiwa yang terjadi di Jakarta tersebut berjalan dari waktu ke waktu pada sebelum dan sesudah malam 1 Oktober 1965. Dalam temuan Roosa, jalannya rangkaian peristiwa tersebut penuh dengan kejanggalan dan banyak menggugurkan narasi bentukan militer yang telah mapan sebelumnya.

Dengan demikian, karya Melvin ini memadukan keduanya; jalannya kekerasan versi pelaku, baik militer melalui struktur komando serta regu paramiliter dan pengalaman para korban, penyintas, maupun saksi dalam mengalami dan melewati waktu-waktu kelam tersebut. Hasilnya kemudian bisa dengan tegas sekali menunjukkan, bahwa kekerasan yang terjadi amat sangat sistematis, terstruktur, terpusat, dan melalui rantai komando dan

struktur hierarkis yang cukup ketat. Semuanya dapat dibuktikan dengan valid melalui dokumen-dokumen dari militer sendiri. Hal ini yang saya kira menjadi suatu temuan baru sekaligus sumbangan penting dari Melvin, baik dalam hal menggali dan mencari penjelasan kembali dari peristiwa yang terjadi setengah abad lalu tersebut, maupun juga dalam konteks kekinian untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu tersebut.

Sorotan lain yang juga menjadi penekanan Melvin terletak pada banyaknya kejanggalan di dalam jalannya kekerasan yang seolah dinarasikan sebagai konflik horizontal di akar rumput, namun ternyata secara tegas diperintahkan oleh struktur komando yang terpusat. Misalnya, dalam hal perburuan, penangkapan, dan pembunuhan terhadap kelompok Tionghoa di Aceh, jalannya kekerasan tersebut termasuk brutal dan kacau. Semua orang Tionghoa dicurigai dan dijadikan sasaran kekerasan. Mereka dipukul rata sebagai anggota maupun simpatisan komunis. Realitanya, orang-orang Tionghoa yang ada di Aceh memiliki keragaman pandangan maupun preferensi politik. Sebagian dari mereka memang tergabung dalam Baperki yang condong maupun dianggap komunis. Namun tidak sedikit pula dari mereka yang cenderung berpihak pada haluan Koumintang, nasionalisme Tiongkok. Selain kedua kelompok besar di atas, ada pula dari mereka yang cenderung apolitis. Kenyataan yang begitu kompleks tersebut kemudian diringkas dalam satu spektrum (komunis) saja di hadapan kelompok opresor yang menangkapi dan menahan mereka.

Selain kelompok Tionghoa, pembersihan terhadap golongan pegawai negeri juga dilakukan dengan cara yang amat sistematis dan terencana. Sejak pertengahan Oktober 1965, sudah muncul dokumen yang berisi daftar nama target pembersihan di kalangan pegawai negeri sipil di seluruh Aceh. Artinya, proses operasi ini bukan hal yang tiba-tiba saja terjadi. Daftar target pembersihan yang sudah disusun dengan seksama menunjukkan bahwa kemungkinan besar sebelumnya telah dipersiapkan rencana untuk melakukan operasi penangkapan dan pembersihan tersebut.

Kesamaan dari dua proses operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap kelompok Tionghoa maupun pegawai negeri adalah keduanya sudah dipersiapkan dengan terencana dan didasarkan atas daftar yang sudah disusun sebelumnya. Ringkasnya, kedua operasi tersebut menyiratkan bahwa jalannya kekerasan sepanjang 1965-1966 bukanlah sesuatu yang sporadis, spontan, atau hanya sebagai letupan konflik horizontal di antara sesama warga negara. Meski tidak dapat ditampik berbagai friksi maupun gesekan di tingkat bawah tersebut ada, namun skalanya seperti tidak pernah terbayangkan sebelumnya; akan semasif, segenas, dan sebrutal 1965-1966. Melvin menegaskan bahwa kekerasan dalam periode ini adalah sebuah peristiwa yang sudah didesain sedemikian rupa, dan dilakukan dengan perintah-perintah yang terkomando dan terstruktur. Mungkin saja beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi

terdapat penyesuaian dengan konteks lokal maupun keadaan yang amat dinamis. Hanya saja, perintah yang dikirimkan melalui telegram di Jakarta dan Medan, serta rapat-rapat umum dan akbar yang menyerukan pembersihan terhadap orang-orang komunis, amat sulit disangkal oleh militer.

Genosida dan Tuntutan Penyelesaian Kasus

Selain temuan dan penggunaan sumber-sumber dari dalam internal militer yang menjadikan buku ini cukup spesial dan berbeda, sorotan lain yang perlu ditunjukkan terhadap buku ini adalah keyakinan Melvin atas penggunaan terminologi sekaligus pengkategorian peristiwa pembunuhan massal 1965 di Indonesia sebagai sebuah genosida. Melvin melihat bahwa ada dua kecenderungan dalam penggunaan istilah ini sebelumnya. Pertama, para sejarawan maupun peneliti yang ragu-ragu dalam menyematkan istilah tersebut. Kedua, para sejarawan dan peneliti yang menggunakannya dengan tanpa dasar yang kuat dan sangat besar terjebak pada situasi dan perasaan untuk membalas dendam semata.

Melvin mencoba menguraikan penjelasan pengkategorian dengan memulai dari betapa definisi genosida yang didasarkan atas Konvensi Genosida 1948 masih amat terbatas untuk memahami pembunuhan massal secara keseluruhan yang memiliki bentuk, motif, dan pola yang beragam. Jika mendasarkan pada putusan Konvensi Genosida 1948, pembunuhan massal sepanjang 1965-1966 di Indonesia tidak masuk dalam kategori genosida karena bukan menasar pada kelompok bangsa, ras, suku, maupun agama tertentu. Maka kemudian menurutnya, pembunuhan yang didasarkan atas preferensi politik si target juga dapat disebut sebagai genosida. Dengan demikian, pembunuhan massal di Indonesia sepanjang 1965-1966 dalam argumennya, dapat dikategorikan pula sebagai genosida. Apalagi, sasaran pembunuhan pada 1965 bukan hanya kelompok komunis, namun juga orang Tionghoa (sebagai sebuah etnik), dan juga mereka yang dianggap ateis (sebagai sebuah kelompok kepercayaan). Artinya, terdapat pula beberapa kategori yang bisa dijadikan dasar bahwa apa yang terjadi di Indonesia pada 1965-1966 adalah sebuah genosida, yang mana para pelakunya amat sangat perlu dan mendesak untuk diseret dan diajukan ke depan pengadilan.

Akibat yang ditimbulkan dari penggunaan terminologi dan pengkategorian peristiwa pembunuhan massal 1965-1966 sebagai sebuah genosida dapat disebut cukup serius. Sebagai sebuah kejahatan berat terhadap kemanusiaan, selama ini tidak ada sama sekali pelaku pembunuhan yang diajukan ke pengadilan. Selain karena narasi yang memposisikan bahwa pembunuhan tersebut adalah sebuah tindakan yang sah karena dianggap “memadamkan pemberontakan”, kebanyakan eksekusi terhadap para korban dilakukan oleh para algojo sipil. Sehingga dengan demikian, negara kerap lepas tangan dengan menganggap peristiwa tersebut sebagai sebuah konflik

horizontal dan mereka datang sebagai pelerai keduanya. Selain itu negara juga dapat memperoleh dalih yang kuat untuk cuci tangan dan terbebas dari tuntutan karena posisinya yang seolah berada di tengah-tengah, memisahkan antara kelompok komunis dan nonkomunis yang sedang bertarung.

Alasan kuat lainnya terletak pada fakta bahwa sama sekali tidak ditemukan perlawanan maupun resistensi yang dilakukan oleh mereka yang dituduh sebagai komunis ketika proses penangkapan, penculikan, penahanan, hingga pembunuhan terjadi. Jangankan memberi perlawanan, mereka yang dituduh sebagai komunis tersebut sama sekali tidak memegang senjata maupun mempersiapkan diri untuk bertempur. Tentu saja hal tersebut bukan fakta baru, mengingat kondisi seperti ini sudah berulang kali dituturkan oleh para penyintas sendiri. Bagi Melvin, di titik inilah ia menegaskan bahwa yang terjadi pada 1965-1966 bukan perang maupun pertempuran, sehingga seolah-olah para pelaku penangkapan dan pembunuhan yang notabene memegang senjata berada dalam keadaan defensif dan sah untuk “membela diri”. Maka kemudian jelas baginya bahwa apa yang terjadi di Aceh, sebagaimana halnya yang terjadi di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia pada kurun waktu tersebut adalah sebuah genosida; pembunuhan massal secara terstruktur, terkomando, dan terencana oleh otoritas militer yang bersenjata terhadap orang-orang sipil yang sama sekali tidak mempunyai kuasa, senjata, maupun perlawanan.

Selain pola kekerasan di atas, Melvin dengan dibantu oleh para narasumber lokal juga menelusuri keberadaan kuburan massal-kuburan massal yang tersebut di seantero Aceh mulai dari Takengon, Gayo, Meulaboh, Tapaktuan, Bireuen, dll. Keberadaan tempat-tempat yang digunakan untuk menguburkan korban pembantaian massal tersebut telah menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat setempat, kendati keberadaannya cenderung ditakuti dan dikeramatkan. Temuan kuburan massal nyaris di tiap kabupaten di Aceh ini sekaligus menjadi jawaban tuntas dan lugas dari Melvin, seperti yang ia tuliskan di kata pengantar, terhadap tantangan Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI saat itu) pada 2016 yang meragukan keberadaan kuburan massal dan menyangkal genosida atau pembantaian massal telah terjadi di Indonesia. Sangkalan ini hanyalah satu contoh kecil bagaimana genosida yang terjadi di Indonesia nampak sekali ditutupi dan

Salah satu motivasi dan alasan penting yang diajukan Melvin atas pengkategorian pembunuhan massal 1965 ini sebagai genosida adalah agar para pelaku dapat benar-benar diadili dan diajukan ke pengadilan, kendati nyaris sebagian besar para pelaku utama atau aktor intelektualnya sudah meninggal dunia. Tentu saja pengkategorian peristiwa tersebut sebagai genosida bukan semata-mata didasarkan atas perasaan dendam semata. Di atas itu semua, penyelesaian peristiwa kekerasan dan pembunuhan massal

ini dapat dilakukan dengan serius, terbuka, serta sesuai dengan porsinya, tidak hanya berhenti pada rekonsiliasi semata yang pada dasarnya kerap mengaburkan bahkan memendam sama sekali terwujudnya keadilan bagi korban.

Tinjauan Kritis Atas Buku

Dalam sudut pandang historiografi Indonesia, buku Jess Melvin ini dapat memberikan kontribusi bagi “pemeriksaan kembali” terhadap detail kronologi sebuah peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Peristiwa 1965. Setelah sekian lama tumpuan atas penulisan peristiwa tersebut didasarkan atas “laporan pandangan mata” dan nampak parsial, Melvin kemudian hadir dengan membawa setumpuk bukti baru dan komprehensif dari dalam tubuh militer sendiri yang selama ini diduga memainkan kuasa yang besar dalam jalannya peristiwa tersebut.

Hasil penelitian Melvin yang cukup detail dan komprehensif dalam menguraikan proses jalannya kekerasan yang terjadi di Aceh tentu saja dapat menjadi pintu masuk untuk melakukan hal serupa di daerah-daerah lainnya. Dengan semakin banyak bentuk penelitian serupa, harapannya dapat ditemukan sebuah pola yang semakin terang yang dapat menguraikan dan menjelaskan ihwal bagaimana persisnya kekerasan tersebut direncanakan, dimulai, dan kemudian dijalankan. Hanya saja hal tersebut bukan sesuatu yang mudah, mengingat akses terhadap sumber-sumber, terutama sumber internal militer, serta kemungkinan ketersediaan dan keterbukannya juga bukan sesuatu yang dapat dipastikan.

Terkait kekurangan dalam buku ini, saya menyoroti pada penggunaan sumber primer lainnya yang masih kurang, yaitu sumber surat kabar sezaman sebagai “penengah” untuk semakin mendapatkan banyak informasi yang lebih detail, dalam, dan luas. Seperti telah diuraikan panjang lebar di atas, selain menggunakan sumber dari dalam internal militer sendiri, Melvin bertumpu pada kesaksian para saksi, penyintas, dan pelaku kekerasan. Sumber surat kabar sezaman dapat digunakan, tentu perspektif dan spektrum yang diselidiki dapat lebih terverifikasi lagi. Hanya saja, seperti diakui oleh Melvin sendiri, arsip surat kabar lokal yang terbit di Aceh nyaris seluruhnya lenyap dalam tragedi tsunami dahsyat yang melanda pada 2004 silam.

Satu hal kecil lain, yang mungkin luput adalah tiadanya daftar pustaka pada bagian akhir buku. Mungkin penulis atau penerbit memiliki pertimbangan tertentu untuk tidak mencantumkan daftar pustaka. Namun, saya kira daftar pustaka perlu untuk ditampilkan agar dapat membantu memberikan referensi dan pustaka pendukung yang lebih luas, terutama dalam memahami mengenai Peristiwa 1965 beserta rangkaian genosida yang mengikutinya.

Terlepas dari berbagai kekurangan lain yang ada, saya kira Jess Melvin

telah menghadirkan sesuatu yang amat penting dan berharga, baik bagi perkembangan penelitian dan penulisan sejarah Indonesia itu sendiri, maupun terutama pada usaha penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang hingga kini terus menjadi beban dan warisan yang menggantung dalam sejarah Indonesia. Harapannya, setelah buku ini terbit dan beredar luas dalam bahasa Indonesia, akan ada kemajuan signifikan dalam proses pencarian keadilan dan pengungkapan kebenaran terkait Peristiwa 1965.